

Gerakan Mahasiswa: Studi Tentang Aliansi Cipayung Kota Bandung Dalam Aksi Bandung Darurat Korupsi

Student Movement: A Study About The Alliance Of Bandung Cipayung In Bandung Emergency Action Of Corruption

Rizkiah¹⁾, R. Widya Setiabudi Sumadinata²⁾ & Yusa Djuyandi³⁾

1)Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

2)Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia

3)Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia

Submitted: January 2021; Reviewed: January 2021; Accepted: January 2021

Coresponding Email: Kvkie121@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis motivasi lahirnya gerakan Aliansi Cipayung Kota Bandung, menganalisis pola gerakan dalam aksi Bandung Darurat Korupsi. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan Aliansi Cipayung Kota Bandung serta dilengkapi dengan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung Kota Bandung dalam aksi Bandung Darurat Korupsi, murni gerakan moral. Gerakan ini menjadi bagian yang harus dilakukan karena ide gagasan setiap organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Bandung adalah untuk membela kaum yang lemah. Korupsi merupakan kejahatan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pemerintahan Kota Bandung. Pola gerakan yang dilakukan di Bandung Darurat Korupsi yaitu melalui diskusi, konsolidasi kemudian melakukan aksi demonstrasi ke jalanan dan menjadikan media sebagai alat konsolidasi dan juga alat untuk kampanye terkait isu-isu. Ihtiar melalui konsolidasi internal itu memberikan wawasan dan pengetahuan yang komprehensif. Basis mengetahui dan meyakini bahwa gerakan ini adalah gerakan yang pantas dilakukan dan diperjuangkan.

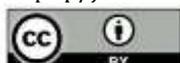
Kata Kunci: Gerakan; Korupsi; Aliansi Cipayung; Kota Bandung

Abstract

This study uses qualitative data interview techniques Cipayung Alliance Bandung City and is equipped with a literature review. The results showed that the movement carried out by the Bandung City Cipayung Alliance in the Bandung Corruption Emergency Action was a moral movement. This movement is a part that must be done because the idea of every student organization that is part of the Bandung City Cipayung Alliance is to activate the weak. Corruption is a crime that results in losses for the government of Bandung City. The pattern of movement carried out in Bandung Emergency Corruption is through discussion, then carrying out street activities and making the media an organizational tool as well as a tool for campaigns related to issues. Ihtiar examining the internal provides comprehensive insight and knowledge. The problem is, to see and believe that this movement is a movement that deserves to be carried out and fought for.

Keywords: Movement; Corruption; Cipayung Alliance; Bandung City

How to Cite: Rizkia, Sumadinata, R.W.S., & Djuyandi, Y. (2021). Gerakan Mahasiswa: Studi Tentang Aliansi Cipayung Kota Bandung Dalam Aksi Bandung Darurat Korupsi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (3): 1292-1299.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang merangkap sebagai individu sekaligus anggota sosial. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Di sisi yang lain sebagai makhluk sosial disadari sepenuhnya bahwa manusia membutuhkan kehadiran orang lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tak mungkin dapat dilakukan sendiri. Thomas Hobbes seperti yang dikutip oleh Muclis Hamdi mengemukakan bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan dan merupakan bentuk kontrak sosial, di mana pemerintah sebagai salah satu unsur di dalamnya berperan untuk mewujudkan kesepakatan yang dibuat dengan warga negaranya melalui berbagai kebijakan publik (Hamdi, 2002).

Terbentuknya Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 dapat diartikan sebagai lahirnya kesepakatan dengan warga negaranya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan secara hukum tertuang dalam UUD 1945. Implementasi dari hal tersebut adalah dilaksanakannya berbagai pasal-pasal nya. Yang perlu ditekankan dalam di sini bagi generasi muda dan mahasiswa adalah betapa perlunya memupuk kesadaran eksistensial sejak dini, sebagai manusia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa warga negara berhak mengekspresikan dirinya melalui kegiatan kolektif dan aspiratif baik secara verbal maupun non-verbal sebagaimana uraian UUD 1945 pasal 28 yang diperuntukkan untuk setiap warga negara. Tugas utama cendekiawan adalah membunyikan alarm politik bagi penguasa atas penggunaan fasilitas negara yang tidak tepat serta dengan mengekspresikan moralitas masing-masing (Sumartana, 1993). Peran mahasiswa adalah membangun aliansi dengan berbagai pemangku kepentingan di era Orde Baru dan turut menggulingkannya. Sejarah hebat pelengseran penguasa menjadi sebuah kekuatan yang hebat sehingga mahasiswa digolongkan kedalam kelas menengah. Karena dalam mengambil keputusan pemerintah cenderung mendengarkan perintah yang didiktekan oleh IMF, situasi ini membuat eskalasi politik di tingkat nasional mengalami perubahan karena adanya desakan untuk memperbaiki situasi ekonomi dari dalam negeri situasi ekonomi dari dalam negeri ekonomi dari dalam negeri.

Hal ini turut mendorong organisasi-organisasi mahasiswa di Kota Bandung untuk melakukan konsolidasi dalam menindaklanjuti problem lokal di sekitar mereka. Aktivis di kalangan kampus menyikapi demonstrasi di berbagai daerah dengan bekerja sama merumuskan poin-poin keresahan dan distribusi keadilan yang tidak merata. Salah satu hasil konsolidasi itu dengan membentuk Aliansi Cipayung Kota Bandung. Aliansi ini terdiri dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) yang memiliki rasa senasib dan seperjuangan untuk menuntut penuntasan sejumlah kasus.

Klimaks dari aliansi ini diadakannya unjuk rasa "Bandung Darurat Korupsi" di Bandung pada tanggal 5 Agustus 2019 adalah untuk merespon berbagai indikasi kasus KKN yang dilakukan Pemkot dan BUMD (Koko, 2019). Termasuk penyelewengan pembangunan ruang terbuka hijau, sanitasi, distribusi air, dan pasar. Gerakan ini dilakukan di Gedung DPRD untuk menuntut komitmen legislatif dalam menjalankan fungsinya untuk menuntaskan KKN dari rongrongan penguasa dan birokrasi. Adapun fokus tuntutan Aliansi Cipayung Kota Bandung terdiri dari: 1) menuntut penuntasan kasus korupsi dan *fraud* wewenang melalui fungsi pengawasan DPRD; 2) menuntut Pemkot Bandung mengevaluasi kebijakan yang diskriminatif; 3) penuntasan kasus-kasus penyelewengan jabatan atas pembangunan ruang terbuka hijau, drainase, dan distribusi air; dan 4) membongkar berbagai kebobrokan birokrasi atas praktik KKN.

Proses panjang itu tidak terlepas dari langkah taktis mahasiswa melalui MALARI dengan berdemonstrasi pada 15 Januari 1974 dihadapan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Bandara Udara Halim, namun gagal. Kegagalan tidak menyurutkan semangat, saat Jan P. Pronk selaku Ketua Inter-Governmental Grup on Indonesia datang, mahasiswa kembali berdemonstrasi hingga memicu kerusuhan di tanggal 17 Januari 1974. Sejarah tragedi Tanjung Priok yang merupakan peristiwa kemanusiaan yang dilakukan kepada kaum ulama yang terjadi sekitar pertengahan tahun 1984, lalu ada tragedi semanggi, gerakan ini tujuan awalnya adalah untuk menolak sidang istimewa 1998 dan juga menentang dwifungsi ABRI/TNI karena dwifungsi



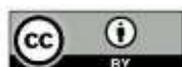
inilah salah satu penyebab bangsa ini tak pernah bisa maju sebagaimana mestinya dan gerakan ini berakhir dengan penembakan kepada sejumlah masa aksi yang terjadi di bawah jembatan semanggi, lalu ada peristiwa tragis penembakan tanggal 12 Mei 1998 terhadap jajaran mahasiswa Trisakti ketika aksi sosial penjatuhan Soeharto dari kursi kekuasaannya, dari berbagai rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini merupakan rekam jejak dan merupakan sisi gelap dari kejamnya rezim otoriter di bawah kepemimpinan jenderal Soeharto ini merupakan tragedi kejahatan kemanusiaan sepanjang abad sejarah.

Gerakan-gerakan aksi ini dari hari kehari semakin intens dan semakin masif, berbagai aksi demonstrasi dilakukan di berbagai tempat. Dengan semakin banyaknya gerakan dari mahasiswa membuat situasi semakin chaos karena terjadi berbagai pembakaran dan penjarahan keadaan seperti ini semakin memperburuk suasana dan tidak ada tanda sedikitpun kapan gerakan ini akan berakhir, semakin bertambahnya gerakan massa dan didukung oleh berbagai media massa membuat pemerintah semakin tertekan yang kemudian peristiwa 21 Mei 1998 sebagai momen dari gerakan mahasiswa dan civil society atau disebut dengan gerakan rakyat pro-demokrasi yang telah berjuang melawan rezim otoriter orde baru. Aksi monumental tersebut telah berhasil merobohkan sebuah rezim yang mampu bertahan sekitar 32 tahun lamanya.

Pasca gerakan reformasi tersebut, lama tak terdengar lagi teriakan serentak dari berbagai penjuror yang disuarakan oleh mahasiswa sebesar gerakan yang terjadi pada Mei 1998. Kemudian, gerakan mahasiswa dan civil society gelombang kedua kembali terjadi pada 23-24 September 2019 lalu. Pada Mei 1998 lalu, isu yang disuarakan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat pro-demokrasi itu semuanya dalam satu narasi yang sama dan fokus pada satu narasi dalam tuntutan yang sama, yaitu lawan rezim orde baru dan turunkan Soeharto yang kemudian itu berhasil. Lain halnya dengan yang terjadi hari ini, setidaknya ada tujuh poin yang menjadi tuntutan dari masa aksi, namun poin-poinnya pun tidak merata, dalam artian adanya pro-kontra tuntutan antara massa aksi. Hingga memicu unjuk rasa berskala luas menjelang berakhirnya masa aktif parlemen lama. Pada hari itu tepatnya tanggal 23 dan 24 September 2019, seluruh massa aksi memenuhi gedung parlemen.

Berbagai kalangan pun ikut berkomentar, dari mulai tokoh politik, pengamat, aktivis maupun mahasiswa itu sendiri. Tidak semua kalangan respek terhadap aksi tersebut, beberapa oknum *menjudge* bahwa gerakan mahasiswa hari ini merupakan aksi yang di tanggungi kepentingan politik elite, namun tidak sedikit juga yang memberikan apresiasi atas gerakan ini. Selain melebarnya isu yang diangkat, terdapat poin dari tuntutan yang tertulis di atas memiliki pro-kontra, seperti RUU PKS, yang kemudian inilah dapat disimpulkan betapa melebar dan tidak meratanya isu yang dibawa. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi pendorong para siswa ini untuk ikut turun kejalan tanpa memahami tuntutan aksi. Momen ini menarik untuk ditelaah terkait pola pergerakan mahasiswa dari 1998 ke 2019, setelah 21 tahun lamanya tidak menyaksikan aksi besar-besaran dari mahasiswa. Demikian, banyaknya kejanggalan-kejanggalan pada aksi 2019 lalu telah mendapatkan banyak perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga turut mendorong organisasi-organisasi mahasiswa di Kota Bandung untuk melakukan konsolidasi dalam menindaklanjuti problem lokal di sekitar mereka. Salah satu hasil konsolidasi itu dengan membentuk Aliansi Cipayang Kota Bandung. Aliansi ini terdiri dari organisasi HMI, PMII, PMKRI, GMKI dan GMNI yang memiliki rasa senasib dan seperjuangan untuk menuntut penuntasan sejumlah kasus. Klimaks dari aliansi ini diadakannya unjuk rasa «Bandung Darurat Korupsi» di Bandung pada tanggal 5 Agustus 2019 adalah untuk merespon berbagai indikasi kasus KKN yang dilakukan Pemkot dan BUMD.

Gerakan ini dilakukan di Gedung DPRD untuk menuntut komitmen legislatif dalam menjalankan fungsinya untuk menuntaskan KKN dari rongrongan penguasa, birokrasi, tokoh, pengamat politik, veteran maupun dari para mahasiswa itu sendiri. Selain melebarnya isu yang diangkat, terdapat poin dari tuntutan yang masih memiliki pro-kontra, seperti RUU PKS, yang kemudian inilah dapat disimpulkan betapa melebar dan tidak meratanya isu yang dibawa. Selain itu, pada aksi september 2019 lalu, massa aksi yang terlibat bukan hanya aliansi mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi, melainkan ada anak STM yang ikut turun kejalan dan menjadi



sorotan media juga para masyarakat luas. Aksi massa ini memicu kerusuhan hingga ditangkapnya 17 orang pengunjuk rasa. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi pendorong para siswa ini untuk ikut turun kejalan tanpa memahami tuntutan aksi. Sehingga momen ini menarik untuk ditelaah terkait pola pergerakan mahasiswa dari 1998 ke 2019, setelah 21 tahun lamanya tidak menyaksikan aksi besar-besaran dari mahasiswa.

Varian gerakan mahasiswa terus berkejolak dari masa ke masa, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan para akademisi. Seperti penelitian Maiwan yang mengidentifikasi gerakan mahasiswa di masa lampau sebagai faktor elementer perubahan sosial dengan membawa segudang aspirasi pada era Orde Baru. Di Indonesia, basis reformasi yang dilakukan mahasiswa untuk menegasikan Orde Baru menjadi titik tolak gerakan mahasiswa di masa depan. Akbar berargumen bahwa mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan dinilai jauh dari anasir-anasir kepentingan politis dan berkontribusi dalam melestarikan demokrasi (Akbar, 2016). Terdapat similaritas aksi kolektif yang dilakukan mahasiswa dengan hegemoni Gramsci. Namun, titik sentralnya justru terletak pada peran sentral kaum intelektual yang dapat mendorong perubahan.

Termasuk gugatan organisasi sipil terkait keputusan politik dalam penyusunan regulasi dengan memberikan tekanan kepada aktor-aktor politik yang terlibat. Bahkan, narasi-narasi yang dikonstruksi oleh sejumlah mahasiswa kerap kali bermaksud mengeliminasi produk kebijakan yang dipandang meresahkan atau bahkan merugikan masyarakat. Terdapat similaritas aksi kolektif yang dilakukan mahasiswa dengan hegemoni Gramsci. Hegemoni sebagai kemampuan mengendalikan menggunakan aksi-aksi kultural oleh kelas dominan. Namun, titik sentralnya justru terletak pada peran sentral kaum intelektual yang dapat mendorong perubahan (Ritzer, 2012).

Kondisi ini turut memengaruhi eksistensi gerakan mahasiswa di tengah gebrakan hegemoni. Gramsci menyebut hegemoni sebagai gebrakan kelas penguasa dalam mengontrol masyarakat melalui cara-cara koersif berupa dominasi maupun persuasif melalui indoktrinasi cara pandang penguasa dan pendidikan (Burke, 2015). Sukses hegemoni apabila mekanisme konsensus yang dieksekusi berhasil memengaruhi masyarakat dan menaati perintah penguasa. Menariknya, jalan konsensus dilakukan oleh golongan intelektual organik, yakni mereka yang beprofesi sebagai figur publik.

Putra dan Ghofur meneliti gerakan mahasiswa di era kontemporer baik dari aspek struktur mobilisasi dan identitasnya (Putra & Ghofur, 2018). Sukmana menyebut kadangkala mobilisasi dan identitas dalam gerakan mahasiswa bersifat integral dan dapat dipertukarkan (Sukmana, 2013). Kemudian Sukendar menyoroti sejumlah gerakan mahasiswa yang berkejolak atas beberapa perumusan undang-undang yang dinilai kontroversial. Informasi tersebut dideteksi dan dianalisis melalui media massa (Sukendar, 2019). Selanjutnya Artidjo Alkostar mengidentifikasi bagaimana korupsi politik berkaitan dengan dimensi sosio politik, sosio ekonomi, sosio budaya, sosio yuridis dan hak asasi manusia. Untuk mendapatkan relevansi sosial dengan analisis yuridis, penelitian ini juga menganalisa strategi atau kebijakan untuk mengatasi fenomena korupsi politik (Alkostar, 2009).

Benang merah dari seluruh penelitian tersebut menunjukkan keberadaan gerakan mahasiswa masih menjadi jalan alternatif dalam menyampaikan aspirasi dengan segala keelakan motivasi yang melatarbelakangi dan format strukturnya. Mahasiswa menjadi salah satu poros yang berperan penting untuk mendeterminasi tindakan-tindakan politik praktis penguasa serta buruknya mekanisme pemerintahan yang dijalankan. Bahkan, narasi-narasi yang dikonstruksi oleh sejumlah mahasiswa kerap kali bermaksud mengeliminasi produk kebijakan yang dipandang meresahkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Penelitian sebelumnya lebih mendeskripsikan masalah gerakan sosial secara sosiologis dan interaktif, yakni bagaimana perubahan-perubahan gerakan mahasiswa mencakup motivasi dan bentuknya, serta bagaimana teorisasi gerakan sosial dikombinasikan antara satu dengan yang lain. Dengan teori gerakan sosial intelektual Gramsci, peneliti hendak mengeksplorasi dan



mensintesisasikan klasifikasi-klasifikasi intelektual yang bergerak dari masing-masing internal organisasi menuju satu gerakan mahasiswa yang lebih sinergis. Benang merah dari seluruh penelitian tersebut menunjukkan keberadaan gerakan mahasiswa masih menjadi jalan alternatif dalam menyampaikan aspirasi dengan segala keelokan motivasi yang melatarbelakangi dan format strukturnya. Mahasiswa menjadi salah satu poros yang berperan penting untuk mendeterminasi tindakan-tindakan politik praktis penguasa serta buruknya mekanisme pemerintahan yang dijalankan. Bahkan, narasi-narasi yang dikonstruksi oleh sejumlah mahasiswa kerap kali bermaksud mengeliminasi produk kebijakan yang dipandang meresahkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah mengelaborasi struktur-struktur organisasi mahasiswa dalam kerangka aliansi untuk membentuk suatu gerakan sosial. Dengan teori gerakan sosial intelektual Gramsci, peneliti hendak mengeksplorasi dan mensintesisasikan klasifikasi-klasifikasi intelektual yang bergerak dari masing-masing internal organisasi menuju satu gerakan mahasiswa yang lebih sinergis. Penelitian ini mengasumsikan bahwa kategorisasi gerakan sosial intelektual tidaklah bersifat atomistis, melainkan dapat diintegrasikan satu sama lain. Sehingga, dapat merekonstruksi teori Gramsci pada kasus-kasus yang teraktual daripada teorisasi sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dilakukan melalui metode kualitatif. Kirk dan Miles sebagaimana dikutip (Moleong, 2009) mengatakan bahwa kualitatif adalah tradisi metodologis yang berfokus pada pengamatan peneliti. Adapun desain penelitian ini menggunakan studi kasus untuk berfokus pada segmentasi peristiwa yang spesifik. Penjabaran komprehensif dengan cakupan yang terbatas cocok diterapkan pada gerakan mahasiswa Aliansi Cipayung Kota Bandung. Perpaduan deskriptif dan studi kasus bermaksud meradikalisir pola gerakan mahasiswa di masa sekarang dibandingkan dengan gerakan mahasiswa di masa lampau, sekaligus untuk mengevaluasi kinerja gerakan mahasiswa Aliansi Cipayung Kota Bandung. Informan adalah pihak-pihak yang menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan informan dipilih secara purposif yang terdiri dari informan kunci meliputi pimpinan struktur Aliansi Cipayung Kota Bandung (HMI, PMII, PMKRI, GMKI, GMNI), serta KAMMI. Sedangkan informan terdiri dari anggota partisipan gerakan mahasiswa Aliansi Cipayung Kota Bandung, dan pengamat di bidang politik. Dipilihnya dua informan ini dipilih karena mereka mengetahui peristiwa sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya secara hierarki. Sedangkan pengamat dihadirkan untuk memberikan pandangannya tentang corak gerakan mahasiswa terkini. Purposive digunakan peneliti yaitu untuk tujuan mendalami informasi yang tidak didapatkan ketika menggali data serta berdasarkan pada kemampuan mereka memberikan kontribusi pada pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Emzir, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai pengurus dari organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Bandung diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Pertanyaan yang diajukan merupakan bagian dari turunan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berkisar kepada motivasi lahirnya gerakan, pola gerakan dan hasil dari gerakan. Selanjutnya melakukan validasi informasi menggunakan teknik dengan cara wawancara mendalam kepada informan selanjutnya validasi hasil wawancara melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Selain berdampak pada aspek kehidupan, korupsi juga menimbulkan efek yang meluas bahkan terhadap eksistensi bangsa dan negara. Misalnya, tingginya harga barang yang memengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain.

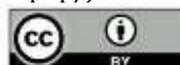
Mahasiswa merupakan komponen masyarakat kelas menengah. Kegelisahan kalangan mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian mendorong perubahan yang reformatif dalam sistem politik di Indonesia. Shill menyebutkan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok¹. Rudolf Heberle menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru (Akbar, 2016). Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser (Akbar, 2016).

Gerakan mahasiswa Cipayung Kota Bandung melakukan aksi dengan dasar reaksi atas adanya kasus korupsi di pemerintahan Kota Bandung (IZ/25 Desember 2020). Gerakan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kampus ini, menjadi sebuah jalan bagi mereka agar aparat pemerintah yang menduduki kursi jabatan sadar dengan fungsi jabatannya. Beberapa tuntutan yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung Kota Bandung ini diantaranya; 1) Menuntut DPRD Kota Bandung untuk bertanggungjawab dalam fungsi legislatif; 2) Menuntut Wali Kota Bandung untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan Kota Bandung; 3) Mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kekuasaan (korupsi yang terus terjadi di Kota Bandung seperti kasus RTH, PDAM, PD Pasar dan kasus lainnya), kepada masyarakat Kota Bandung; 4) Menuntut KPK untuk langsung menangani persoalan korupsi di Kota Bandung yang mandeg di Kejati dan Kejari; 5) Usut tuntas kasus korupsi (CHS, 2019).

Gerakan Aliansi Cipayung yang terdiri dari unsur organisasi kemahasiswaan yaitu: PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik



Indonesia) dalam aksinya menyampaikan tuntutan-tuntutan terhadap Pemerintah Kota Bandung (CHS, 2019). Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung Kota Bandung merupakan bentuk protes akibat adanya kasus korupsi, suap serta penyalahgunaan wewenang dari sejumlah aparatur pemerintahan Jawa Barat dan pemerintahan kota Bandung (Arbi, 2019). Aksi-aksi yang dilakukan tersebut menuntut agar Walikota Bandung mengevaluasi kinerja dan berbagai kebijakan pemerintahan Kota Bandung, mereka menyuarakan bahwa Kota Bandung darurat korupsi serta bertanggung jawab dalam fungsi legislatif dan mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kekuasaan diantaranya korupsi RTH, PDAM dan PD Pasar (Surya, 2019). Terbukti pada tahun 2020 telah terbukti adanya korupsi di dinas Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat dari adanya gerakan aksi-aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Bandung (Billiocta, 2020).

SIMPULAN

Motivasi lahirnya gerakan Aliansi Cipayung Kota Bandung dalam Bandung Darurat Korupsi yaitu adanya kecemasan, pikiran dari internal karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Bandung. Gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung Kota Bandung merupakan gerakan moral. Adanya aksi-aksi darurat korupsi untuk mencegah dan memberikan kesadaran bahwa yang dilakukan Aliansi Cipayung adalah murni gerakan moral sehingga berefek kepada masyarakat untuk mengetahui dan berharap korupsi merupakan kejahatan. Berangkat dari basis atau berangkat dari pengetahuan yang memang diamati dan di diskusikan. Selaku organisasi Cipayung harus bergerak tidak diam ketika ada situasi dan juga kondisi tidak kondusif. Keterlibatan dalam gerakan merupakan bagian dari harapan dan keinginan agar Bandung menjadi lebih baik. Sebagai mahasiswa tentunya kekritisan bagian dari kontrol masyarakat yang harus dilaksanakan. Bukti adanya aparatur pemerintahan yang ditangkap oleh KPK merupakan hasil yang positif dari gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, M. R. (2005). Peranan Mahasiswa Dalam Memerangi Korupsi.
- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). Jurnal Wacana Politik, Vol. 1 No.
- Alkostar, A. (2009). "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). Jurnal Hukum, Vol 16.
- Arbi, N. (2019). Aksi Darurat Korupsi. Jabar.Antaraneews.Com. Retrieved from <https://jabar.antaraneews.com/foto/105506/aksi-darurat-korupsi>
- Billiocta, Y. (2020). Korupsi RTH, Mantan Kadis DPKAD Kota Bandung Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Merdeka.Com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-rth-mantan-kadis-dpkad-kota-bandung-dijebloskan-ke-lapas-sukamiskin.html>
- Burke, P. (2015). Sejarah dan Teori Sosial. (Mestika Zeid, Zulfahmi & A. Sairozi, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- CHS, Y. (2019). Tuduh Kota Bandung Darurat Korupsi, Aliansi Cipayung Kota Bandung Lakukan Aksi Unjuk Rasa Di Kejati. Indofakta.Com. Retrieved from http://indofakta.com/news_17472.html
- Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamdi, M. . (2002). Gerakan Sosial (Wahana Civil Society bagi Demokratisasi). Jakarta: Yarsif Watampone.
- Koko, T. (2019). " Bandung Darurat Korupsi ", Aliansi Cipayung Unjuk Rasa di Kota Bandung. Transaktual.Com. Retrieved from <https://www.transaktual.com/kabar/246/-bandung-darurat-korupsi--alian-si-cipayung-unjuk-rasa-di-kota-bandung.html>
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methode. Sage Publication.
- Moleong,L.J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, M. ., & Ghofur, M. . (2018). Pola Komunikasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Di Kota Malang. ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Ritzer, G. (2012). Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sukendar, M. . (2019). Konstruksi Realitas Berita #Gejayan Memanggil 23 September 2019 Dalam Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com.”. Detik.com.
- Sukmana, O. (2013). “Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory Dan Identity-Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru.” *Sosiologi Reflektif*, 5 No. 1.
- Sumartana. (1993). *Anarki Kepatuhan*. Yogyakarta: LKiS.
- Surya, M. H. (2019). Aliansi Cipayung: Kota Bandung Darurat Korupsi. Retrieved from <https://portaljabar.net/web/22050/aliansi-cipayung-kota-bandung-darurat-korupsi.html>

